

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini akan dipaparkan simpulan dari hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini. Terdapat pula saran dari peneliti untuk peneliti lain yang berencana meneliti fenomena kebahasaan dengan pendekatan sosiopragmatik, baik itu mengenai kesantunan imperatif atau karakteristik tuturan politisi. Adapun uraian secara terperinci dari simpulan dan saran sebagai berikut.

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Dalam teks berita Pemilu Presiden 2014 dalam situs berita *Rakyat Merdeka Online (RMOL.CO)* terdapat 128 tuturan imperatif. Tuturan-tuturan imperatif tersebut dituturkan oleh 44 politisi dan 38 masyarakat. Tuturan imperatif politisi dan masyarakat memiliki jenis makna imperatif yang berbeda dan konteks situasi tuturan yang berbeda pula. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan 12 jenis makna sosiopragmatik imperatif di dalam tuturan imperatif politisi. Masing-masing wujud makna sosiopragmatik imperatif tersebut antara lain tuturan yang mengandung makna sosiopragmatik imperatif (a) perintah; (b) suruhan; (c) permintaan; (d) permohonan; (e) desakan; (f) bujukan; (g) imbauan; (h) ajakan; (i) mengizinkan; (j) larangan; (k) harapan; dan (l) anjuran. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan pula 9 jenis makna sosiopragmatik imperatif di dalam tuturan imperatif masyarakat. Masing-masing wujud makna sosiopragmatik imperatif tersebut antara lain tuturan yang mengandung makna sosiopragmatik imperatif (a) suruhan; (b) permintaan; (c) desakan; (d) imbauan; (e) ajakan; (f) mengizinkan; (g) larangan; (h) harapan; dan (i) anjuran.
- 2) Frekuensi kemunculan masing-masing wujud makna sosiopragmatik imperatif dalam tuturan politisi antara lain yang mengandung makna sosiopragmatik imperatif: (a) perintah berjumlah 5 tuturan atau 5,62%; (b) suruhan berjumlah

4 tuturan atau 4,69%; (c) permintaan berjumlah 9 tuturan atau 10,12%; (d) permohonan berjumlah 1 tuturan atau 1,12%; (e) desakan berjumlah 15 tuturan atau 16,86%; (f) bujukan berjumlah 2 tuturan atau 2,24%; (g) imbauan berjumlah 1 tuturan atau 1,12%; (h) ajakan berjumlah 9 tuturan atau 10,12%; (i) mengizinkan berjumlah 2 tuturan atau 2,24%; (j) larangan berjumlah 12 tuturan atau 13,48%; (k) harapan berjumlah 14 tuturan atau 15,73%; dan (l) anjuran berjumlah 15 tuturan atau 16,86%.

Adapun frekuensi kemunculan masing-masing wujud makna sosiopragmatik imperatif dalam tuturan masyarakat antara lain yang mengandung makna sosiopragmatik imperatif: (a) suruhan berjumlah 2 tuturan atau 5,13%; (b) permintaan berjumlah 3 tuturan atau 7,70%; (c) desakan berjumlah 9 tuturan atau 23,08%; (d) imbauan berjumlah 1 tuturan atau 2,56%; (e) ajakan berjumlah 5 tuturan atau 12,82%; (f) mengizinkan berjumlah 2 tuturan atau 5,13%; (g) larangan berjumlah 6 tuturan atau 15,38%; (h) harapan berjumlah 1 tuturan atau 2,56%; dan (i) anjuran berjumlah 10 tuturan atau 25,64%.

- 3) Wujud kesantunan politisi didominasi oleh tuturan yang dinyatakan secara tidak langsung dalam modus kalimat deklaratif dan literal pada jenis makna sosiopragmatik imperatif perintah, suruhan, permintaan, permohonan, desakan, bujukan, imbauan, ajakan, mengizinkan, harapan. Pada tuturan imperatif politisi dengan makna sosiopragmatik imperatif jenis anjuran terdapat 1 tuturan dinyatakan secara tidak langsung dalam modus kalimat interogatif dan tidak literal. Tuturan imperatif politisi dengan makna sosiopragmatik imperatif jenis larangan terdapat 1 tuturan dinyatakan secara langsung dalam modus kalimat imperatif dan literal. Berdasarkan skala kesantunan Leech, wujud kesantunan politisi yang mengandung kadar kesantunan rendah terdapat pada tuturan imperatif dengan makna sosiopragmatik imperatif perintah, suruhan, permintaan, desakan, dan larangan. Kadar kesantunan tinggi terdapat pada tuturan imperatif dengan makna sosiopragmatik imperatif permohonan, bujukan, imbauan, ajakan, mengizinkan, harapan, dan anjuran.

Wujud kesantunan masyarakat didominasi oleh tuturan yang dinyatakan secara tidak langsung dalam modus kalimat deklaratif dan literal pada jenis makna sosiopragmatik imperatif perintah, suruhan, permintaan, desakan, imbauan, ajakan, mengizinkan, harapan. Pada tuturan imperatif masyarakat dengan makna sosiopragmatik imperatif jenis anjuran terdapat 1 tuturan dinyatakan secara tidak langsung dalam modus kalimat interogatif dan tidak literal. Pada tuturan imperatif masyarakat dengan makna sosiopragmatik imperatif jenis larangan terdapat 1 tuturan dinyatakan secara langsung dalam modus kalimat imperatif dan literal. Berdasarkan skala kesantunan Leech, wujud kesantunan politisi yang mengandung kadar kesantunan rendah terdapat pada tuturan imperatif dengan makna sosiopragmatik imperatif perintah, suruhan, permintaan, desakan, dan larangan. Kadar kesantunan tinggi terdapat pada tuturan imperatif dengan makna sosiopragmatik imperatif imbauan, ajakan, mengizinkan, harapan, dan anjuran.

- 4) Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan strategi kesantunan imperatif dalam tuturan imperatif politisi yang menyangkut ciri linguistik sehingga mewujudkan kesantunan linguistik, sedangkan yang menyangkut ciri nonlinguistik mewujudkan kesantunan pragmatik. Dalam tuturan imperatif politisi ditemukan strategi kesantunan linguistik. Berdasarkan panjang-pendek tuturan, ditemukan 67 tuturan imperatif dengan kalimat panjang dan 22 tuturan imperatif dengan kalimat pendek. Berdasarkan urutan tutur, ditemukan 53 tuturan imperatif dengan urutan tutur langsung dan 36 urutan tutur tidak langsung. Berdasarkan keberadaan ungkapan penanda kesantunan, ditemukan ungkapan penanda kesantunan dalam makna sosiopragmatik imperatif: (1) perintah, yakni *menginstruksikan, konsolidasikan, perintahkan, kawal, dan instruksikan*; (2) suruhan, yakni *tidak menginginkan, harus, dan berhentilah*; (3) permintaan, yakni *ingin, minta, berikanlah, diminta, pesan, meminta, dan agar*; (4) permohonan, yakni *mohon*; (5) desakan, yakni *harus dan minta*; (6) imbauan, yakni *mengimbau*; (7) ajakan, yakni *mengajak, ikuti saja, mari, dan ayo*; (8) mengizinkan, yakni *silakan*; (9) larangan, yakni *jangan dan tidak boleh*; (10) harapan, yakni

mudah-mudahan, harapan, semoga, harap, agar, masih menaruh harapan, dan harapkan, dan (11) anjuran, yakni seharusnya, sebaiknya, dipikir dulu, partikel -lah, mestinya, lebih baik, supaya, dan menyarankan.

Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan pula strategi kesantunan imperatif dalam tuturan imperatif masyarakat yang menyangkut ciri linguistik sehingga mewujudkan kesantunan linguistik, sedangkan yang menyangkut ciri nonlinguistik mewujudkan kesantunan pragmatik. Dalam tuturan imperatif masyarakat ditemukan strategi kesantunan linguistik. Berdasarkan panjang-pendek tuturan, ditemukan 34 tuturan imperatif dengan kalimat panjang dan 5 tuturan imperatif dengan kalimat pendek. Berdasarkan urutan tutur, ditemukan 25 tuturan imperatif dengan urutan tutur langsung dan 14 urutan tutur tidak langsung. Berdasarkan keberadaan ungkapan penanda kesantunan, ditemukan ungkapan penanda kesantunan dalam makna sosiopragmatik imperatif: (1) perintah, yakni *cermati*; (2) suruhan, yakni *hindari (verba+i), suruh, dan kembalikan (verba+kan)*; (3) permintaan, yakni *tidak ingin, tak ingin, dan meminta*; (4) desakan, yakni *, perlu segera, dan mendesak*; (5) imbauan, yakni *mengimbau*; (6) ajakan, yakni *mari*; (7) mengizinkan, yakni *silakan*; (8) larangan, yakni *jangan*; (9) harapan, yakni *berharap dan semoga, dan (10) anjuran, yakni lebih baik, harus, pantas, mestinya, seharusnya, perlu, harusnya, dan sebaiknya.*

- 5) Berdasarkan hasil analisis, tanggapan publik terhadap tuturan imperatif politisi yang berisi tanggapan terhadap: (a) peristiwa dalam teks berita berjumlah 16 tanggapan; (b) pernyataan sumber informasi berjumlah 4 tanggapan; (c) objek yang terdapat dalam pernyataan sumber informasi berjumlah 59 tanggapan; (d) lembaga atau instansi dari sumber informasi atau objek yang disebutkan sumber informasi berjumlah 1 tanggapan; dan (e) sesama penanggap berjumlah 12 tanggapan. Dapat disimpulkan bahwa tanggapan publik terhadap tuturan imperatif politisi lebih didominasi oleh tanggapan terhadap objek dalam tuturan sumber informasi dibandingkan peristiwa dalam teks berita tersebut. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan 17 tuturan dari penanggap publik yang menyelamatkan muka dari sumber informasi (politisi) dan objek

yang disebutkan dalam tuturan sumber informasi. Ditemukan pula 75 tuturan dari penanggap publik yang mengancam muka dari sumber informasi (politisi) dan objek yang disebutkan dalam tuturan sumber informasi. Jumlah tuturan yang mengancam muka pihak lain lebih banyak daripada tuturan yang menyelamatkan muka pihak lain. Dapat disimpulkan bahwa tanggapan public terhadap tuturan imperatif politisi memiliki kadar kesantunan yang rendah.

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan 85 tanggapan publik terhadap tuturan imperatif masyarakat yang berisi tanggapan terhadap: (a) peristiwa dalam teks berita berjumlah 7 tanggapan; (b) pernyataan sumber informasi berjumlah 26 tanggapan; (c) objek yang terdapat dalam pernyataan sumber informasi berjumlah 21 tanggapan; (d) lembaga atau instansi dari sumber informasi atau objek yang disebutkan sumber informasi berjumlah 2 tanggapan; dan (e) sesama penanggap berjumlah 29 tanggapan. Dapat disimpulkan bahwa tanggapan publik terhadap tuturan imperatif masyarakat lebih didominasi oleh tanggapan terhadap sesama penanggap dan sumber informasi (masyarakat) dibandingkan peristiwa dalam teks berita tersebut.

Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan 38 tuturan dari penanggap publik yang menyelamatkan muka dari sumber informasi (masyarakat) dan objek yang disebutkan dalam tuturan sumber informasi. Ditemukan pula 47 tuturan dari penanggap publik yang mengancam muka dari sumber informasi (masyarakat) dan objek yang disebutkan dalam tuturan sumber informasi. Jumlah tuturan yang mengancam muka pihak lain hampir berimbang dengan tuturan yang menyelamatkan muka pihak lain. Namun tetap lebih banyak tuturan yang mengancam muka pihak lain. Dapat disimpulkan bahwa tanggapan publik terhadap tuturan imperatif masyarakat tergolong cukup santun.

5.2 Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis Sosiopragmatik bisa dimanfaatkan untuk mengkaji kesantunan imperatif dalam ranah pemerintahan (politik). Biasanya kesantunan dalam berbahasa hanya dilihat dari ada tidaknya ungkapan penanda kesantunan, misalnya *mohon* atau *harap*. Dengan adanya penelitian ini bisa sedikit menyadarkan bahwa ilmu bahasa bisa fungsional dalam mengungkap fenomena yang sama dengan sudut pandang berbeda.

Penelitian ini lebih menarik dilengkapi analisis aspek formal yang lengkap dari mulai mulai aspek fonologi, morfologi, dan sintaksis. Pada penelitian selanjutnya diharapkan ada peneliti yang mengkaji kesantunan berbahasa dengan pendekatan sosiopragmatik dan dilengkapi dengan aspek formal tersebut. Akan lebih menarik pula jika ada penelitian lanjutan terkait kesantunan imperatif atau jenis lainnya dalam ranah yang berbeda, misalnya pada ranah transaksional bisnis.